

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT AKIBAT KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DI KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT

Indrati Sri Suciati, Suryaningsih, Emmy solina

Program Studi Sosiologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Social changes are any changes in social institutions within a society, which affect the social system, including the values, attitudes and behavior patterns among groups in society. Pressure on the definition is the basic set of social institutions as human beings, the changes which then affect other social systems. Based on preliminary observations of this LPG conversion program apparently was sudden and unplanned comprehensively. Framework will be operationalized concept refers to the opinion Selo Soemardjan and Bertrand which state that social change affects the social system, where the elements of the social system, namely beliefs, feelings and thoughts, goals, rules / norms, status/ role and facilities. Qualitative research with a qualitative descriptive design format, which aims to describe, to tell a variety of conditions, situations and phenomena of social realities that exist in society. Sampled data were collected through interviews with informants as many as 14 people. From the research results can be concluded that the kerosene to LPG in the Village of West Tanjungpinang has given the change to more efficient public spending among others so survival is more assured, the pattern of behavior among members of the public is more awake, environmental sustainability is maintained by the reduction of air pollution so as to create of a society that is more practical, efficient and effective.

Keywords: *Social Change, LPG.*

Pendahuluan

Perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan primernya yang mencakup baik aspek materiil maupun spirituilnya. Kebutuhan-kebutuhan primer tersebut senantiasa berkembang, sehingga harus selalu disesuaikan dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya, baik yang berasal dari lingkungan sosial maupun lingkungan alam.

Salah satu produk olahan minyak bumi yang dekat dengan masyarakat ialah minyak tanah. Mulai dari lampu bakar hingga kompor menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utamanya, sehingga pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi minyak tanah yang lebih besar dibandingkan LPG. Selain dari

segi ekonomi, ternyata dalam proses distribusi minyak tanah pun sering terjadi penyelewengan-penyelewengan baik oleh distributor maupun konsumen.

Kenaikan minyak dunia yang cenderung tidak stabil juga akan meresahkan masyarakat Indonesia, sehingga kondisi sosial akan menjadi tidak stabil juga. Padahal, dapat kita lihat bahwa konsumsi BBM khususnya minyak tanah sangat besar di Indonesia. Saat harga minyak dunia naik, maka harga minyak tanah yang dijual di masyarakat juga akan naik sehingga warga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli bahan bakar. Secara tidak langsung hal tersebut berakibat pada penurunan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Di Kota Tanjungpinang sendiri, dimana masyarakatnya merupakan masyarakat yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia, diantaranya suku Melayu, Jawa, Batak, China, Minangkabau dan lain-lain. Kemajemukan masyarakat tersebut menyebabkan pengalaman atau pergaulan dengan suku-suku bangsa asing yang datang ke Tanjungpinang mendorong mereka bersikap terbuka, namun tetap berhati-hati. Bagi sebagian orang, sikap hati-hati tersebut sering ditafsirkan secara keliru, sehingga muncul anggapan bahwa orang melayu menolak budaya baru, tertutup, anti perkembangan, anti kemajuan dan tidak mau mengikuti perubahan zaman. Padahal, jika kita mengkaji dan menyimak tunjuk ajar Melayu dengan cermat akan tampak bahwa kebudayaan Melayu sangat mementingkan kemajuan dan ilmu pengetahuan dalam arti luas.

Penggunaan LPG sesungguhnya lebih hemat dibandingkan dengan minyak tanah, sehingga ini merupakan alternatif bahan bakar yang menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat dan bisa mempengaruhi adanya perubahan sosial didalam masyarakat tersebut. Konversi minyak tanah ke LPG di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat memberikan perubahan sosial budaya bagi masyarakat di Tanjungpinang, diantaranya lebih efisien waktu, berdaya guna, penurunan tingkat polusi akibat penggunaan minyak tanah, dan penggunaan teknologi yang lebih maju akan berdampak pada modernisasi masyarakat itu sendiri.

Program konversi minyak tanah ke LPG ini dilaksanakan dengan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 Kg, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/6/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 Tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (Tiga) Kg Dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2008, Serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61/M-IND/PER/6/2009 tentang Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) Kg Beserta Asesorisnya dan Kompor Gas Satu Tungku untuk Usaha Mikro dalam Rangka Program Konversi Minyak Tanah ke LPG.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah penelitian yang diajukan adalah "Bagaimana perubahan sosial masyarakat akibat konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tanjungpinang Barat menyangkut sikap dan pola perilaku masyarakat, efisiensi waktu serta tujuan yang diharapkan?"

Pembahasan

1. Perubahan sosial masyarakat akibat konversi minyak tanah ke LPG

Dari hasil wawancara dengan para informan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat yakin dan percaya dengan program pemerintah yaitu konversi minyak tanah ke LPG dapat memberikan dampak yang lebih baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini ditandai dengan sudah banyak masyarakat yang mau

memakai kompor LPG dan mereka merasakan ada penghematan sedikit dari pembelian tabung gas dibandingkan jika memakai minyak tanah, meskipun ada sebagian masyarakat yang belum berani memakai kompor gas karena takut terjadi ledakan sehingga mereka menganggap bahwa program pemerintah ini hanya akan menambah masalah baru dimana harga minyak tanah malah semakin mahal.

2. Pengetahuan mengenai konversi minyak tanah ke LPG

Untuk dapat memasukkan masyarakat dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pemberi dan pelaku kebijakan. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan, pengetahuan serta kemauan mereka sehingga kebijakan yang telah dibuat akan dapat diterima oleh masyarakat untuk menuju kearah kehidupan yang lebih baik.

Dari beberapa pernyataan dari para informan melalui wawancara mengenai pengetahuan mereka tentang konversi minyak tanah ke LPG, peneliti menarik kesimpulan bahwa banyak masyarakat yang kurang paham dengan istilah konversi minyak tanah ke LPG, hal itu terjadi karena mayoritas masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang Barat tingkat pendidikan SMA dan sebagai ibu rumah tangga. Masyarakat hanya mengetahui bagaimana sebenarnya program pemerintah ini berjalan untuk mewujudkan konversi minyak tanah ke LPG atau pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG melalui pembagian paket tabung LPG.

3. Peran pemerintah setempat terhadap proses penggunaan LPG

Untuk meningkatkan penggunaan tabung yang aman bagi masyarakat, maka pemerintah melalui Pertamina telah melakukan langkah-langkah seperti meningkatkan pengecekan kualitas tabung sesuai SNI juga secara reguler dan pemeriksaan terhadap seluruh material konversi dari saat penerimaan dari pabrikan sampai dengan saat pembagian serta melakukan pengecekan terhadap tabung LPG 3 kg keseluruhan jalur distribusi seperti pada agen. Selain itu juga melakukan inspeksi dan pemberian sanksi pada jalur distribusi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata niaga LPG 3 kg dan tabung serta memberikan asuransi bagi pengguna LPG 3 kg untuk kejadian/kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan material dan aksesoris paket perdana LPG 3 kg, termasuk didalamnya korban kebakaran.

Pada kenyataan di lapangan seperti dikemukakan oleh salah seorang informan yang merupakan ketua RW berinisial UD mengenai peran Pemerintah setempat terhadap proses penggunaan LPG menyatakan bahwa Pemerintah telah memberikan paket tabung LPG 3 kg yang terdiri dari kompor, tabung gas, selang dan regulator ke masyarakat, namun sejauh ini belum ada pemeriksaan yang dilakukan pemerintah setempat mengenai penggunaan LPG dari rumah kerumah.

Seorang informan yang berinisial LW juga menyatakan pendapat yang hampir sama dimana sejauh ini pemerintah melalui kelurahan berperan dalam mendistribusikan paket tabung LPG 3 kg ke masyarakat tanpa ada tindak lanjut untuk bersosialisasi bagaimana prosedur

penggunaan yang benar kepada masyarakat.

Dari beberapa pernyataan dari para informan melalui wawancara mengenai peran pemerintah setempat terhadap proses penggunaan LPG di Kelurahan Tanjungpinang Barat, peneliti menarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam konversi minyak tanah ke LPG berupa memberikan paket tabung LPG 3 kg yang terdiri dari kompor, tabung gas, selang dan regulator ke masyarakat, namun sejauh ini belum ada pemeriksaan yang dilakukan pemerintah setempat mengenai prosedur penggunaan LPG ke masyarakat.

Sosialisasi pemerintah ke masyarakat

Adapun langkah-langkah yang diambil pemerintah melalui Pertamina untuk terus memantau kualitas paket konversi dengan tujuan untuk melindungi konsumen antarlain melakukan investigasi pada setiap insiden yang dikaitkan dengan penggunaan material LPG, melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat meliputi aspek pengenalan material konversi, tata cara penggunaannya, termasuk peningkatan awareness akan aspek keamanan dalam penggunaan LPG, bekerja-sama dengan aparat dan dinas terkait dengan melaksanakan inspeksi terhadap pabrikan material LPG 3 kg, jalur distribusi LPG (termasuk agen) guna mengantisipasi beredarnya material (tabung) illegal serta penempatan sticker instruksi keselamatan pada tabung LPG 3 kg.

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan yang merupakan ketua RT sekaligus tokoh masyarakat berinisial RB mengenai ada tidaknya sosialisasi ke masyarakat mengenai tata cara penggunaan LPG demi keamanan menyatakan bahwa Pemerintah pernah memberikan sosialisasi setelah

pembagian paket tabung LPG 3 kg di tingkat kecamatan dengan mengundang para ketua RT dan RW. Namun sampai saat ini ketua RT maupun RW beserta pemerintah setempat belum melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat.

Seorang informan yang berinisial SL juga menyatakan pendapat yang hampir sama bahwa sejauh ini pemerintah melalui kelurahan berperan dalam mendistribusikan paket tabung LPG 3 kg ke masyarakat tetapi belum ada sosialisasinya.

Dari beberapa pernyataan dari para informan melalui wawancara mengenai peran pemerintah setempat terhadap proses penggunaan LPG di Kelurahan Tanjungpinang Barat, peneliti menarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam konversi minyak tanah ke LPG berupa memberikan paket tabung LPG 3 kg yang terdiri dari kompor, tabung gas, selang dan regulator ke masyarakat, namun sejauh ini belum ada pemeriksaan yang dilakukan pemerintah setempat mengenai prosedur penggunaan LPG ke masyarakat.

Fasilitas

Fasilitas ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dan telah ditentukan terlebih dahulu. Fasilitas disini menyangkut sarana yang mendukung lancarnya penggunaan kompor LPG, seperti regulator yang berstandar Nasional Indonesia (SNI), jenis kompor gas dan sebagainya.

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan yang merupakan ketua RW berinisial UD mengenai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa paket tabung LPG 3 kg menyatakan bahwa pembagian paket tabung

LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah kurang maksimal karena kompor, regulator dan selang yang diberikan cepat rusak dan dianggap kurang aman sehingga banyak masyarakat yang memilih membeli sendiri kompor dan regulator yang lebih aman, meskipun harganya mahal. Hanya tabung 3 kg saja yang masih dipakai.

Penutup

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan dengan menggunakan indikator yang telah peneliti tentukan, maka dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tanjungpinang Barat telah memberikan perubahan bagi masyarakat antarlain lebih hemat pengeluaran sehingga kelangsungan hidup lebih terjamin, pola perilaku diantara anggota masyarakat lebih terjaga, kelestarian lingkungan tetap terjaga karena berkurangnya polusi udara sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih praktis, efisien dan efektif. Selain itu ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kompor LPG, diantaranya dengan adanya peningkatan intensitas komunikasi diantara anggota masyarakat tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik yang tidak diinginkan baik diantara masyarakat maupun anggota keluarga.

Sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang masih merasa was-was menggunakan kompor LPG, khususnya di Kelurahan Tanjungpinang Barat serta masih kurangnya partisipasi pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pemeriksaan berkala berkaitan dengan penggunaan kompor gas di masyarakat karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap tata cara

penggunaan LPG sesuai prosedur yang benar, maka penulis mengemukakan saran-saran antara lain :

1. Agar masyarakat mamahami penggunaan kompor gas sesuai prosedur yang benar, maka peran pemerintah sangat diperlukan melalui sosialisai kepada masyarakat langsung sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.
2. Dalam hal keamanan dan kenyamanan penggunaan kompor gas di masyarakat, maka perlu dilakukan pemeriksaan berkala oleh Pertamina terhadap para agen-agen LPG untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan tabung LPG yang bisa membahayakan warga.
3. Masyarakat harus lebih waspada dan memeriksa sendiri keadaan tabung gas setiap saat sebelum digunakan untuk memasak sebagai antisipasi terjadinya kebocoran gas.

Daftar Pustaka

- Suwarsono dan Alvin Y. So, 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- Sztompka, Piotr, 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada.
- Soekanto, Soerjono, 1991. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia
- Giddens, Anthony, 2010. *Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nazir, Muhammad, 2005. *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Idris, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: UII Press.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta.

Nasikun, 2001. Sistem Sosial Indonesia, Jakarta

: PT. Raja Grafindo Persada.
<http://www.pertamina.com/>, didownload tanggal 8 Maret 2011.
<http://www.haluankepri.com/>, didownload tanggal 8 Maret 2011.